

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM POLITIK KESEJAHTERAAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA MAKASSAR)

Muhammad Ay^{1*}, Agustiar Saleng²

^{1,2}Universitas Teknologi Sulawesi
aymuhammad@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 5 Oktober 2023

Page: 453-463

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/866>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i5.866>

Article History:

Received: 23-08-2023

Revised: 01-09-2023

Accepted: 06-09-2023

Abstract : In the regional autonomy era, issues related to welfare are used by prospective political leaders or incumbents as instruments to gain public support. In Makassar City, welfare politics can be seen in the city government's innovations under Danny Ramadhan Pomanto. This study focuses on how welfare issues are used by city governments as a political agenda to perpetuate and maintain their electability at the grass-roots level. This study formulates two main issues: (1) How do incumbents maintain their electability through welfare issues? (2) How is the participation of citizens in the achievement of welfare politics? This research uses qualitative research methods with descriptive analysis. Data sources are interview data and literature review. Data analysis techniques use data reduction, data presentation, and conclusion verification. The results showed two faces of power relations carried out by Danny Pomanto. As a mayor, populist patterns are seen in the planning and process of welfare programs. Meanwhile, as an incumbent in political contestation, the patronage pattern is seen in the mobilization of government and community officials who aim to maintain and build patronage bonds through the distribution of social assistance targeting citizens as potential voters to get electoral effects in the following year's mayoral election.

Keywords : Welfare Politic, Clientelism Politic, Participation

Abstrak : Di era otonomi daerah saat ini, isu-isu terkait kesejahteraan digunakan oleh para calon pemimpin politik atau petahana sebagai instrumen untuk mendapat dukungan publik. Di Kota Makassar, politik kesejahteraan terlihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Ir. Danny Ramadhan Pomanto. Studi ini berfokus pada bagaimana isu-isu kesejahteraan dipergunakan oleh pemerintah kota sebagai sarana politik untuk melanggengkan dan merawat keterpilihannya pada tingkat akar rumput (*grass root*). Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana petahana merawat atau menjaga elektabilitasnya melalui isu-isu kesejahteraan? (2) Bagaimana partisipasi warga dalam pencapaian politik kesejahteraan yang menjadi program kerja pemerintah kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data adalah data hasil wawancara dan data telaah pustaka. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, sajian data, dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian memperlihatkan dua wajah relasi kekuasaan yang dilakukan oleh Danny Pomanto. Sebagai seorang Walikota, corak populis terlihat pada perencanaan dan proses program-program kesejahteraan yang tidak memiliki dasar hukum. Sedangkan sebagai petahana dalam kontestasi politik, corak patronase terlihat pada mobilisasi aparat pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk merawat dan membangun ikatan-ikatan patronase melalui distribusi bantuan sosial yang menasar warga sebagai pemilih potensial untuk mendapatkan efek elektoral di pemilihan walikota tahun berikutnya.

Kata Kunci : Politik Kesejahteraan, Politik Klientelisme, Partisipasi

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya orde baru dengan 32 tahun kepemimpinan yang sangat sentralistik, tahun 1998 merupakan tonggak awal lahirnya era reformasi. Dimana terjadi perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi era otonomi daerah. Sebuah era yang ditandai dengan dimulainya pemilihan langsung kepala daerah. Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberi ruang untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan agenda lokal yang tertuang pada visi misi kepala daerah saat ajang pemilihan berlangsung. Isu-isu kebijakan publik dan kesejahteraan menjadi perhatian utama para politisi lokal dalam pembangunan di daerahnya. Gagasan terpenting dari otonomi daerah adalah bahwa keputusan yang menyangkut masyarakat sebisa mungkin dibuat oleh pejabat yang tingkatnya paling dekat dengan rakyat [1], selain itu penduduk suatu wilayah harus mendapatkan hak dan tanggung jawab menyangkut isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Namun, sebagaimana hasil penelitian *Power, Welfare and Democracy* (PWD) pada tahun 2014 bahwa politik kesejahteraan di negara berkembang khususnya di Indonesia nampak jelas bahwa skema-skema kesejahteraan yang berbasis negara bukan merupakan wujud dari kematangan aspek kewargaan [2]. Politik kesejahteraan lebih sebagai inisiatif dari kepala pemerintahan untuk menggunakan isu kesejahteraan sebagai cara untuk memperoleh dukungan publik. Skema kesejahteraan dilaksanakan lebih sebagai instrument politik, termasuk untuk kepentingan elektoral dan peneguhan kekuasaan melalui jalur-jalur klientelisme [3].

Setelah melalui proses Pemilihan Umum pada tahun 2013, Walikota terpilih Ir. Ramadhan Pomanto dan Wakil Walikota Syamsu Rijal, M.Si kemudian melaksanakan berbagai kebijakan populis yang terkait pelayanan publik. Program tersebut antara lain, Makassar Tidak Rantasa (MTR), Bank Sampah, Gendang Dua, Kantong Sampah, Lorong Garden (Longgar) yang terkait dengan Manajemen Lingkungan; Apartemen Lorong (Aparong) yang terkait Perumahan; *Home Care Dottoro'ta* terkait Layanan Kesehatan, Badan Usaha Lorong (BULO), Kanre Rong terkait Vitalisasi Ekonomi; Pete-pete Smart dan BRT terkait Sarana Transportasi.

Dari berbagai kebijakan publik tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terkait politik kesejahteraan di Kota Makassar karena di bawah kepemimpinan Ir. Danny Ramadhan Pomanto sangat banyak program inovasi Pemerintah kota terkait pelayanan publik yang dicanangkan namun tidak berhasil dijalankan bahkan berhenti pada ide semata seperti program Aparong dan Pete-pete smart. Sedangkan program lainnya selain menuai kritikan juga gagal terimplementasi dengan baik dalam 5 tahun masa kepemimpinannya. Batasan pada penelitian ini, bahwa studi ini bukan berfokus pada monitoring dan evaluasi program yang membahas keberhasilan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Namun akan menfokuskan pada bagaimana isu-isu kesejahteraan dipergunakan oleh pemerintah kota sebagai sarana politik untuk melanggengkan dan merawat keterpilihannya pada tingkat akar rumput (*grass root*).

Beberapa penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi program pemerintah kota terkait isu kesejahteraan masyarakat di era walikota Danny Pomanto. Zulfikar membahas mengenai Implementasi dari program Smart City di kota Makassar yang memberi beberapa catatan, diantaranya adalah adanya kendala kelembagaan dan kendala hukum. Kendala kelembagaan yaitu belum tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain sehingga belum ada unit yang bertanggungjawab dalam koordinasi dan perencanaan. Sedangkan kendala hukum dan perundang-undangan disebabkan karena belum adanya pengaturan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor pemerintahan (Zulfikar, 2021). Serupa pula pada penelitian Nurfahmiati yang membahas mengenai program Badan Usaha Lorong (BULO) yang pada implementasinya ternyata belum memiliki dasar kebijakan yang jelas, sebagaimana belum diaturnya program tersebut dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan wali kota (Perwali) (Nurfahmiati, 2018). Lain halnya pada Program Gerakan Makassar ta Tidak Rantasa (MTR), hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur menemukan bahwa MTR sudah cukup efektif dari sisi adaptasi dalam pelibatan kerjasama antara swasta dan pemerintah. Namun dari partisipasi masyarakat, belum ada peningkatan yang signifikan (Nur, 2015). Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa program-program inovasi yang menjadi andalan walikota terpilih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Bahkan beberapa program tidak melalui proses kajian

akademik berupa penelitian dan melalui proses identifikasi permasalahan di masyarakat sebelum menjadi sebuah kebijakan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk membahas mengenai bagaimana walikota terpilih mempergunakan program-program terkait isu kesejahteraan untuk memperoleh dan merawat keterpilihan yang memberi efek elektoral dimasa yang akan datang. Olehnya itu, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana petahana merawat atau menjaga elektabilitasnya melalui isu-isu kesejahteraan? jaringan dan organisasi apa yang digunakan untuk memobilisasi dan merawat dukungan electoral tersebut? (2) Bagaimana partisipasi warga dalam pencapaian politik kesejahteraan yang menjadi program kerja pemerintah kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi Corona Virus (COVID -19) tahun 2019, dimana terbatasnya mobilitas penduduk dengan adanya kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* (menjaga jarak interaksi sosial dan jarak fisik) oleh pemerintah. Hal tersebut merupakan tantangan dalam metode penelitian sosial khususnya pada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, Metode yang dilakukan untuk menganalisis data terdiri dari proses yang saling terkait; **(1) Studi Literatur;** adalah pengumpulan data dan informasi awal untuk persiapan penelitian. Studi kebijakan perundangan-undangan RPJMD kota Makassar 2014-2019, visi misi pemerintah kota Makassar 2014-2019, studi literatur dari laporan penelitian, makalah-makalah seminar dan berbagai liputan atau pemberitaan dari media massa (media cetak, media elektronik maupun media online) atau melalui pengumpulan data berbasis digital dengan pemanfaatan big data yang relevan dengan kajian studi. Data awal yang diperoleh kemudian direduksi sehingga menentukan kerangka kerja konseptual, pertanyaan penelitian dan kasus. **(2) Tahap Pengumpulan data di lapangan;** Pada masa pandemi COVID-19, pertimbangan untuk menggunakan teknik pengumpulan data secara jarak jauh dilaksanakan secara fleksibel baik melalui daring dengan pemanfaatan platform digital seperti *videocall* dilakukan untuk alasan efisiensi waktu, biaya dan keamanan (Mann, C., & Stewart, F, 2000). Apabila diperlukan dilaksanakannya wawancara langsung, sedapat mungkin interaksi langsung yang dilakukan tidak melanggar protokoler kesehatan yang berlaku pada masa pandemi COVID-19. Peneliti juga melakukan *Shadowing* dengan turut serta dalam melihat proses kerja dari Komunitas Bersih dalam menjalankan aktivitas sosial di Masyarakat.

Adapun informan dalam penelitian ini melibatkan pihak terkait seperti 1) Penerima Manfaat (masyarakat dan Tokoh Masyarakat Kota Makassar) materi diskusi; terkait partisipasi dan manfaat program terhadap lingkungan mereka, 2) Penanggungjawab Program dan Aparat Pemerintah, 3) Pakar kebijakan publik, legislator dan LSM lokal, materi diskusi; terkait strategi dan proses pelaksanaan program. Catatan lapangan, hasil wawancara mendalam dan data yang diperoleh kemudian diseleksi dan dilakukan perangkuman data (*data summary*), memilih hal-hal yang pokok dan penting kemudian dilakukan pengelompokan (*clustering*) data berdasarkan tema dan pola yang sesuai dengan tujuan penelitian. **(3) Tahap penyajian data (data display);** Pada tahap ini dilakukan proses analisa dan pengkajian sehingga data yang diperoleh dapat membangun konstruk informasi yang padat terstruktur sehingga memungkinkan pengambilan kesimpulan. **(4) Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi;** penetapan makna dari data yang tersaji. Proses ini juga menggunakan metode triangulasi data, menindaklanjuti temuan-temuan dan cek-silang hasilnya dengan informan.

Metode menjelaskan rancangan kegiatan, bagaimana cara memilih responden/khalayak sasaran, bahan dan alat yang digunakan, desain alat beserta kinerja dan produktivitasnya, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Politik Kesejahteraan Pemerintah Kota Makassar

Setelah terpilih sebagai pejabat walikota, Danny Ramadhan Pomanto berupaya merangkul berbagai elemen masyarakat di kota Makassar. Sebagai seorang yang berlatar belakang akademisi, bapak Danny Ramadhan Pomanto tentu memahami betapa pentingnya dukungan

dunia akademik dalam menunjang kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Pelibatan akademisi yang bersifat konsultatif sebagai narasumber dalam forum-forum pertemuan menjadi awal kesepahaman mengenai strategi yang dibutuhkan guna mendukung pencapaian visi misi kota Makassar. Visi Pemerintah Kota Makassar 2014- 2019 memiliki konsistensi dengan visi Kota Makassar 2005-2025, khususnya pada penekanan “orientasi global”, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Makassar dirumuskan sebagai “kota dunia”. Penekanan “berwawasan lingkungan” dan “paling bersahabat” pada visi dalam RPJMD dirumuskan sebagai “yang nyaman untuk semua” pada visi dalam RPJMD 2014-2019.

Dengan visi tersebut, pemerintah kota Makassar melakukan serangkaian inovasi-inovasi diberbagai bidang. Bila dikategorisasi, inovasi pada pelayanan publik Kota Makassar dapat terlihat pada bagan berikut ini:

Tabel 1. Inovasi Pada Pelayanan Publik Kota Makassar

Bidang	Nama Inovasi	Bentuk Program	Status
Pendidikan	Passikola	Penyediaan Bus Antar Jemput Anak Sekolah	Berlanjut
Kesehatan	Dottoro'ta	Layanan Kesehatan Pasien Rawat di Rumah	Berlanjut
Perumahan	Aparong	Pemukiman warga lorong (Apartemen Lorong)	Gagal
Transportasi	Pete-Pete Smart	Penyediaan mobil angkutan umum (minibus) dengan fasilitas Wifi gratis	Gagal
Ekonomi	BULO & Kanre Rong (Badan Usaha Lorong)	Wira Usaha Cabe di Lorong	Berhenti
Manajemen Lingkungan	Longgar (Lorong Garden), Makassar Tidak Rantasa (MTR), Bank Sampah	Penataan Lingkungan wilayah Lorong	Berlanjut
Pemudaan & Olahraga	Golo Rong	Sepak bola di area terbatas	Berhenti

Sumber: {Diolah dari hasil wawancara dan data sekunder}

Dari tujuh inovasi yang di programkan oleh pemerintah kota, hanya pada program manajemen lingkungan yang dapat dikategorikan berjalan efektif. Dengan menyasar kelompok komunitas lorong sudah menjadi perencanaan Danny Pomanto sejak awal kampanyenya. Dengan Tagline “Anak Lorong na Makassar”, Danny Pomanto sudah menjadikan isu Lorong sebagai bagian inti dari program-program kesejahteraannya. Jumlah Lorong di Kota Makassar adalah 7.520 lorong yang tersebar di 14 kecamatan. Dengan asumsi bahwa komunitas Lorong cenderung memiliki ikatan-ikatan kekerabatan yang masih kuat, mudah dalam hal mobilisasi, kesamaan permasalahan memudahkan proses patronase dan kebijakan populis dengan mudah mendapat apresiasi oleh warga.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka diawali dengan upaya meningkatkan kapasitas penanganan sampah dan kebersihan dengan rencana strategis yaitu menanamkan budaya bersih dalam masyarakat dan peningkatan kapasitas penanganan sampah. Dari upaya tersebut sehingga melahirkan program yaitu Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR) dengan target awal di tahun 2014 ditujukan kepada 20 kelurahan dan pada tahun 2018 yaitu 143 kelurahan telah melaksanakan program Gemar MTR ini. Namun pelaksanaan program MTR tidak diatur dalam Peraturan daerah maupun Peraturan Walikota, hanya didasari atas Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program MTR Kota Makassar. Dengan tidak adanya Perda atau Perwali yang mengatur tentang program Makassar Ta Tidak Rantasa, maka tidak ada naskah yang menjelaskan tentang konsep pelaksanaan dari program ini. Terlebih lagi walikota Makassar menyatakan dalam pidatonya bahwa Makassar Ta Tidak Rantasa ini bukan cuma masalah sampah akan tetapi segala aspek kehidupan. Ini membuat konsep dari Gerakan

Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) semakin tidak jelas. Hal tersebut juga berdampak terhadap pelaksanaan program yang sulit dinilai pencapaian tujuan kegiatan. Meski demikian, indikator keberhasilan program ini adalah Masyarakat Kota Makassar yang merasa puas terhadap pengelolaan sampah ditingkat kecamatan dan kelurahan.

Secara konseptual di setiap kecamatan wajib membentuk FORKASIH yang merupakan singkatan dari Forum Kampung Bersih. Forum ini merupakan wadah bagi pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pendukung Gemar MTR. Dalam Surat Keputusan Walikota Makassar poin ketiga memutuskan bahwa: Mewajibkan kepada para Camat untuk segera membentuk FORKASIH tingkat kecamatan guna mendukung program Gemar MTR dengan melibatkan para fasilitator dan kader lingkungan di wilayah masing-masing yang selama ini aktif dalam kegiatan Makassar *Green and Clean*. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada kecamatan yang membentuk FORKASIH. Pada umumnya kegiatan antara masyarakat dan pemerintah hanya berupa kerja bakti yang terlebih dahulu disosialisasikan jadwalnya oleh pemerintah.

Di Kecamatan dibentuk Relawan MTR ditingkat masyarakat selain itu para pegawai di lingkup pemerintah kota yang diwajibkan untuk turut serta membantu dan menjadi penggerak dalam menjalankan kegiatan MTR di wilayah sekitar domisilinya. Hal tersebut disampaikan oleh seorang kasi Persampahan salah satu kelurahan di Makassar bahwa: “dari kelurahan sangat menginginkan adanya keterlibatan masyarakat sebagai penggerak, jadi bukan cuma pemerintah. Mereka bergerak atas kerelawanan, meluangkan waktu dan tenaga untuk membersihkan lingkungan. Jadi dia sebagai motivator dan pionir bagi masyarakat lain di lingkup wilayahnya supaya ikut membersihkan”.

B. Komunitas Makassar Bersih

Setelah berjalan dua tahun, program MTR yang bergerak melalui jalur birokrasi tersebut dianggap belum cukup efektif. Birokrasi yang dimaknai sebagai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat belum mempunyai efek dorong karena belum adanya dasar hukum terkait implementasinya. Salah satu upaya untuk mengatasi lemahnya daya dorong guna menyukseskan program tersebut, terbentuklah Komunitas Makassar Bersih (KOMBES). Pembentukan Lembaga ini tidak lepas dari peran individu Aspianor Masrie sebagai Ketua lembaga. Diawali sebagai gerakan moral keprihatinan terhadap lingkungan, KOMBES kemudian turut serta dalam menunjang program MTR yang dilaksanakan oleh Pemerintah kota. Gerakan ini menggunakan media sosial Facebook sejak 2015 sebagai basis gerakan dengan nama akun ‘Makassar Bersih’. Akun ini beranggotakan mulai dari warga, simpatisan, aparat kecamatan, kelurahan hingga ke tingkat ketua RW dan RT dan diikuti juga oleh bapak Danny Pomanto. Jumlah anggota group Makassar Bersih saat ini adalah 6,300 orang. Akun ini mensosialisasikan gerakan dan aktifitas kebersihan di masing-masing kelurahan. Melalui Akun facebook inilah masyarakat dapat melaporkan masalah lingkungan di wilayahnya dan sebagai sarana pemerintah kota dalam hal ini adalah walikota Makassar dapat memperoleh informasi dan mengukur kinerja aparat dan aktifitas warga dalam gerakan kebersihan yang telah dicanangkan. Makassar Bersih ini yang pada awalnya “gerakan sosial”, kemudian di tahun 2018 membentuk wadah organisasi masyarakat yang lebih resmi dengan nama yang sama Komunitas Makassar Bersih (KOMBES). Lembaga nirlaba ini bergerak di bidang kepedulian lingkungan dan peningkatan partisipasi warga.

Munculnya Akun Makassar Bersih mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari Walikota Makassar bapak Danny Pomanto. Dalam pelaksanaannya, Makassar Bersih menggalang para camat, lurah serta ketua RT RW untuk mensosialisasikan dan melaporkan Kegiatan kebersihan yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing. Dalam Program MTR sendiri, Karena dari segi birokrasi dan pendanaan sudah tidak menjadi bagian dari leading sektor Dinas Pertanaman dan Kebersihan. Maka pelaksanaan dan pemantauannya dilaporkan langsung kepada kepala daerah dalam hal ini bapak Walikota Danny Pomanto. Celah birokrasi tersebut memberi peluang bagi KOMBES untuk menggalang para camat, lurah serta ketua RT RW dalam wadah Makassar Bersih. Pihak Camat, Lurah secara kontiyu melakukan ‘pelaporan’ berupa foto Kegiatan ke Akun Makassar Bersih. Demikian pula dalam hal koordinasi, Selain membuat Akun

Facebook media sosial dengan nama yang sama yaitu Makassar Bersih, juga memiliki group chat terbatas menggunakan platform Whatsapp group beranggotakan 30an bahkan ada yang berisi 200an Anggota yang terdiri dari para camat, lurah, aktivis kombes dan bapak Danny Pomanto selaku walikota. Group whatsapp KOMBES ini terbagi berdasar kecamatan bahkan kelurahan di Kota Makassar. Kesemua Akun media sosial tersebut dipergunakan sebagai media Informasi, pelaporan dan pemantauan aktivitas kebersihan di kota Makassar di tingkat aparat Pemerintah kota mulai dari camat, lurah dan RT RW dan beranggotakan Bapak Danny Pomanto dan Aspianoor Masrie selaku Ketua Kombes dan para sahabat KOMBES (relawan).

Pada awalnya aktivitas KOMBES adalah memfasilitasi dan mengatasi kebuntuan Gerakan MTR dalam program kebersihan pemerintah kota Makassar. Namun sejak 2018, sesaat menjelang masa bakti bapak walikota Makassar Danny Pomanto berakhir. KOMBES kemudian berbadan hukum dan secara formal menjadi lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang sosial dengan visi “berbasis Swadaya Masyarakat Menuju Kota Dunia”. Setiap hari KOMBES menyalurkan sumbangan dari berbagai donatur yang tersebar dari berbagai kalangan. Pelaksanaan aktivitas sosial KOMBES mengikuti jadwal kerja para pengurusnya.

Tabel 2. Aktivitas KOMBES

Hari	Kegiatan / Program	Keterangan
Senin	Delima	Sedekah Muslimah
Selasa	Selamat	Sedekah Lansia & Masyarakat
Rabu	Sekilas	Sedekah Disabilitas
Kamis	Pasti	Paket Sedekah Anak Yatim Piatu
Jumat	Smart	Sedekah Makanan untuk Masyarakat
Sabtu	Trust	Santunan Beras untuk Masyarakat

Sumber: {Diolah dari hasil wawancara}

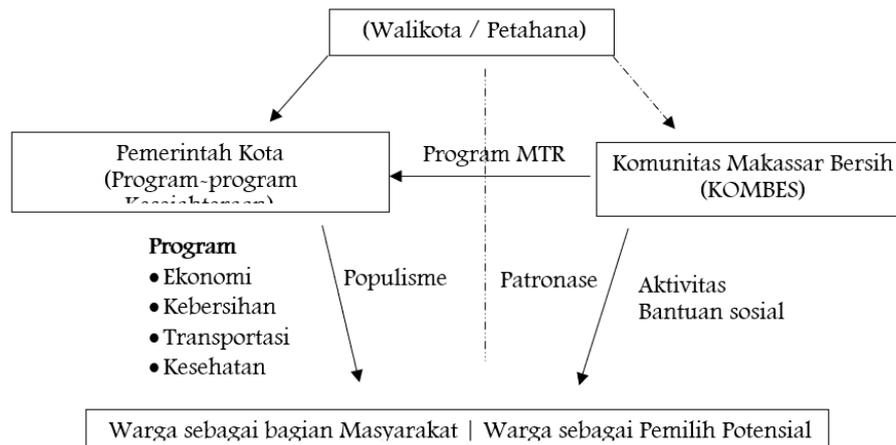
Melalui program-program sosial tersebut diatas, KOMBES tak ubahnya menjalankan peran sebagai patron. KOMBES adalah cara yang efektif membuat pola patronase melalui relasi yang murni klientelistik berjalan dengan efektif. Menjelang pemilihan walikota 2019, relasi yang terbangun melalui program-program bantuan sosial tersebut tidak sekedar pertukaran material jangka pendek (*one-off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi terbentuknya relasi jangka panjang yang sama-sama menguntungkan.

Sebagai incumbent, Danny Pomanto secara bertahap berupaya membangun dan merawat relasi klientelistik dengan para penerima keuntungan dari politik patronase ini secara langsung atau melalui perantara (*broker*) di tingkat akar rumput yang dapat dipercaya dan yang telah memiliki relasi personal cukup dekat dengan pemilih. Memanfaatkan lembaga-lembaga sosial seperti KOMBES untuk mengikat para pemilih dengan menanamkan kepercayaan para pemilih potensial melalui penyaluran dan agenda sosial yang terus menerus melalui berbagai program dan kelompok sasaran yang bervariasi, mulai dari anak-anak, keluarga, orang tua, komunitas hingga ke kelompok disabilitas.

Kemudahan dan keterlibatan KOMBES dalam aktivitas sosialnya di akar rumput, tidak bisa dipisahkan dari dukungan para tokoh masyarakat. Para tokoh ini adalah orang-orang lokal yang berdasar teritori memiliki jabatan formal dalam sebuah institusi pemerintahan. Misalnya pada unit-unit pemerintahan terendah seperti pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau tokoh pada organisasi sosial formal lainnya seperti tokoh pemuda. Orang-orang atau tokoh yang telah mendapat kepercayaan sosial (*social Trust*) yang ada dalam suatu wilayah tertentu dijadikan sebagai broker atau menjadi jejaring klientelistik untuk mendapatkan dukungan politik. Karena pemerintah kota menyampaikan patronase kepada orang atau tokoh yang dipercaya oleh warga. KOMBES melalui para broker membuat patronase berfungsi dengan efektif karena mampu menjamin adanya rasa terimakasih dan kewajiban untuk memilih. Secara umum, melalui jaringan klientelistik seperti ini, broker akan mampu menyampaikan, memonitor dan bahkan mendesak kepatuhan pemilih. Broker juga lebih paham akan kondisi riil yang ada di lapangan, misalnya seorang broker lebih mengetahui jika si penerima uang/barang mendukung atau tidak mendukung kandidat (Stokes et. al. 2013; Wang dan Kurzman 2008 dalam). Meskipun demikian, incumbent atau kandidat tetap tersamarkan oleh

posisi KOMBES sebagai lembaga nirlaba yang secara platform kelembagaan berorientasi sosial semata. Uniknya, bentuk *Programmatic Mobilization* yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah (incumbent) kini juga dilakukan oleh sebuah lembaga yang berfokus pada aktivitas sosial namun pola distribusi, penggunaan simbol, warna, bentuk logo dan kemasan pada bantuan erat kaitannya dengan pemerintah kota atau Danny Pomanto secara pribadi. Kegiatan sosial ini dapat pula dikategorikan sebagai *Pork Barrel* karena dilakukan menjelang pemilihan walikota di tahun berikutnya atau di tahun 2019 dimana Danny Pomanto akan *running* sebagai incumbent untuk masa bakti lima tahun berikutnya.

Bagan berikut ini memberi ilustrasi bagaimana praktek-praktek patronase dan populisme dipakai sebagai strategi distribusi kesejahteraan untuk memperoleh dukungan publik.



Bagan 1. Ilustrasi Praktek Patronase dan Populisme

Sumber: {Diolah dari hasil wawancara}

Bagan di atas memperlihatkan adanya dua jenis relasi kekuasaan, yakni yang bercorak populisme dan bercorak patronase. Keduanya menjadi strategi yang digunakan para aktor politik untuk mendekatkan hubungan dengan masyarakat, khususnya dalam konteks politik di mana sistem distribusi kesejahteraan belum berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan Weyland dalam Paskarina (2017) bahwa populisme muncul ketika para aktor politik berupaya membangun kedekatan hubungan dengan warga masyarakat atau konstituennya melalui program-program yang berpihak pada aspirasi publik (Paskarina, 2017). Pada konteks kota Makassar, dua wajah relasi kekuasaan tersebut dilakukan oleh Danny Pomanto. Sebagai seorang Walikota, corak populis terlihat pada perencanaan dan proses program-program kesejahteraan yang tidak memiliki dasar hukum, juga tidak melalui proses kebijakan publik yang melibatkan masyarakat. Sedangkan sebagai petahana dalam kontestasi politik, corak patronase terlihat pada pelibatan aparat pemerintah dan masyarakat pada program MTR. Kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut untuk merawat dan membangun ikatan-ikatan patronase melalui distribusi bantuan sosial yang menyasar warga sebagai pemilih potensial untuk mendapatkan efek elektoral menjelang pemilihan walikota di tahun berikutnya.

Kesemua program kegiatan diatas rutin dilaksanakan setiap hari mulai tahun 2018-hingga tahun 2020. Aktivitas ini dapat dilihat pada Akun media sosial Facebook dengan nama akun Komunitas Makassar Bersih, "Menata Lingkungan Berkelanjutan. Koordinasi langsung melalui jejaring sosial berupa pelaporan dan unggah aktivitas kegiatan kebersihan di setiap kecamatan dan kelurahan adalah salah satu politik kesejahteraan pemerintah kota dengan menjadikan isu-isu kesejahteraan seperti kebersihan dan bantuan sosial adalah pintu utama untuk merawat dan merebut hati warga masyarakat di pemilihan umum daerah selanjutnya. Hal demikian teruji ketika pada tahun 2019, disaat masa jabatan Danny Pomanto berakhir dan kembali mencalonkan diri sebagai kandidat Kepala Daerah kota Makassar untuk tahun 2019-2023. Pada saat itu, Danny Pomanto menghadapi kandidat lain Munafri Arifuddin. Beberapa partai seperti PKPI, PAN, PPP, Gerindra, PKS, Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Idaman awalnya mendukung Danny Pomanto untuk Maju di periode keduanya, namun beberapa partai kemudian

menarik dan mengalihkan dukungan ke kandidat lain (Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi).

Maju melalui jalur independen, Danny Pomanto berhasil mengumpulkan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 125.471 dukungan. Jumlah dukungan KTP tersebut melebihi syarat yang ditetapkan KPU yang berjumlah 65.000 KTP. Namun, Sebagai petahana yang maju kembali melalui jalur independen kemudian terdiskualifikasi karena terkait pelanggaran pemilu.

Dukungan Masyarakat terhadap Danny Pomanto kemudian kembali terlihat ketika Pasangan Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi menjadi calon tunggal dan melawan Kotak Kosong. Menurut salah seorang informan, kampanye Kotak Kosong (KoKo) kemudian marak di kedua media sosial baik itu di Facebook maupun di group whatsapp KOMBES. Jejaring yang sudah terbentuk bertahun tahun inilah yang kemudian memberi keuntungan elektoral bagi Danny Pomanto meskipun dalam beberapa wawancara anggota KOMBES menolak dikaitkan dengan aktivitas Danny Pomanto, tetapi KOMBES juga tidak menafikan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap perolehan suara Danny Pomanto dimasa pemilihan kepala daerah 2018.

C. Partisipasi Masyarakat

Turut sertanya Komunitas Makassar Bersih dalam menunjang pelaksanaan program MTR dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi elemen masyarakat. KOMBES dalam pembentukan dan pelaksanaannya tidak dan menghindari penggunaan Anggaran Pembiayaan Bangunan Daerah (APBD) sebagaimana yang dikemukakan oleh Aspianoor Masrie selaku Ketua KOMBES. Namun kedekatan personal bapak Aspianoor Masrie sebagai staf ahli walikota terpilih merupakan catatan tersendiri bahwa kegiatan KOMBES tidak murni untuk tujuan-tujuan sosial semata. Dukungan dan partisipasi masyarakat dapat dibangkitkan bila masyarakat meyakini bahwa pembangunan itu sejalan dengan aspirasinya. Menurut Hadi (2012), partisipasi mempunyai prinsip adanya pelibatan atau peran serta masyarakat secara langsung.

Sehingga secara sederhana dapat digambarkan bahwa belum dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Namun demikian partisipasi masyarakat dalam dalam Program MTR dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yaitu:

1. Mobilisasi Aparat Sipil Negara

Dari beberapa wawancara menunjukkan bahwa dengan adanya program yang ‘memaksa’ Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota untuk turut serta berkontribusi menangani kebersihan di wilayah tempat tinggal mereka. Pemerintah Kota Makassar membuat jadwal kerja bakti yang bertujuan untuk membiasakan masyarakat untuk membersihkan lingkungan kerja, rumah dan lingkungan sekitar dirinya. Jumat bersih itu ditujukan untuk pegawai pemerintahan maupun karyawan swasta membersihkan di tempat kerja, Sabtu bersih itu ditujukan kepada sekolah-sekolah baik murid, dan guru untuk membersihkan sekolah masing-masing.

2. Peran Dinas Terkait

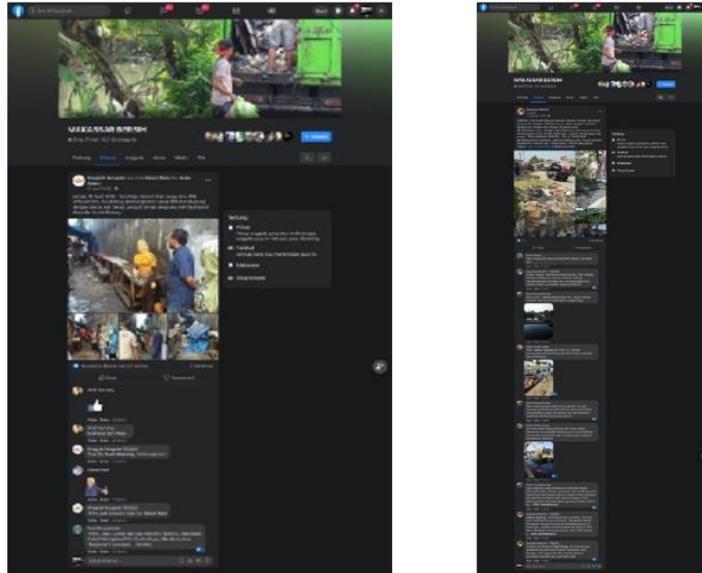
Dinas yang sangat berperan serta dalam Kegiatan ini adalah Dinas Permukiman & Prasarana Wilayah Kota (PU) dan Dinas Pertanaman & Kebersihan. Dukungan Alat berat hingga tenaga teknis menjadi hal yang sangat dibutuhkan di kedua instansi ini.

3. Peran Aparat Kecamatan, Kelurahan hingga Ketua RT RW

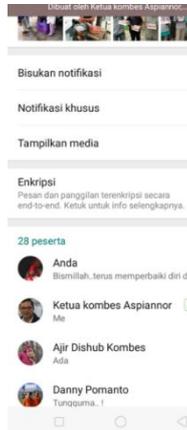
Camat, Lurah dan para Ketua RT RW adalah kunci utama dalam program ini. Camat dan Lurah adalah aparat pemerintah kota yang bertanggung jawab langsung terkait wilayah kecamatan dan kelurahan. Sebagai tokoh masyarakat, Ketua RT dan RW memiliki peranan besar dalam mempengaruhi dan menggerakkan warga untuk ikut serta terlibat mulai dari sosialisasi perencanaan, pembangunan sampai pada pemeliharaan dan pemanfaatan. Hari minggu adalah jadwal kerja bakti ditingkat warga. Dikoordinasi langsung mulai dari Camat, Lurah hingga ketua RT dan RW. Dari Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa faktor peran ketua RW sebagai tokoh masyarakat menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong partisipasi masyarakat di wilayahnya masing masing. Hierarki yang terbentuk menimbulkan hubungan patron-klien dalam birokrasi, patron memelihara dukungan klien-nya dengan memberikan insentif berupa sejumlah kemudahan maupun keluasaan akses dalam

pengelolaan sumberdaya, termasuk dengan mendudukkan klien pada jabatan-jabatan penting dalam struktur formal.

Pada *Screenshot* halaman media sosial *facebook* Komunitas Makassar Bersih berikut ini dapat terlihat bagaimana para aparat (klien) berlomba-lomba melakukan *update* kegiatan di wilayahnya sebagai pelaporan hasil kerja kepada patron-nya (Walikota). Selain itu terdapat pula media pelaporan menggunakan akun aplikasi *Whatsapp*. Ukuran kinerja dapat terlihat seberapa aktif para aparat dalam membuat pelaporan. Selain itu, kedua media sosial tersebut menjadi wujud akuntabilitas publik para aparat kepada masyarakat.



Gambar 1. Akun Media Sosial Facebook KOMBES



Gambar 2. Salah Satu Akun Whatsapp KOMBES



Gambar 3. Aktivitas Sosial KOMBES

KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan melihat penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada program-program inovasi Pemerintah Kota, politik kesejahteraan dengan menggunakan cara-cara klientelisme sangat terlihat utamanya pada Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa. Program MTR cukup efektif dari sisi adaptasi yang sudah terbangunnya hubungan kerjasama Pemerintah Kota – Perusahaan / Sektor Swasta – Organisasi Masyarakat – dalam melaksanakan kegiatan tersebut sudah berjalan cukup baik, namun belum memenuhi prinsip-prinsip partisipasi yang sebenarnya. Dari sisi partisipasi masyarakat belum ada peningkatan secara signifikan. Kegiatan partisipasi masih sebatas partisipasi pasif. Kecenderungan masyarakat turut serta dalam Kegiatan Karena adanya mobilisasi dari aparat pemerintahan setempat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa bagaimana isu kesejahteraan yang diusung kandidat hanya sebatas program populisme tanpa disertai oleh mekanisme kebijakan publik. Perlunya edukasi masyarakat terkait program-program dan penguatan kontrol terhadap implementasi program perlu ditingkatkan. Karena lemahnya mekanisme kontrol bukan saja ada di level masyarakat namun juga ada di level lembaga berwenang seperti DPRD maupun pada Lembaga-lembaga terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lemahnya mekanisme kontrol ini menjadi celah terjadinya klientelisme politik yang bertujuan untuk melanggangkan kekuasaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan atas perolehan dana hibah dari kemenristek dikti melalui kompetisi hibah nasional Penelitian Dosen Pemula tahun 2019. Penulis sangat mengapresiasi kepada para narasumber maupun para informan yang senantiasa meluangkan waktu wawancara ditengah hambatan pandemi covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E. & Sukmajati (Ed.). (2015). Politik Uang Di Indonesia (Patronase dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014). Yogyakarta : PolGov.
- Herman (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1 (1), 75-98
- Keputusan Walikota Makassar No. 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah Binaan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa (Gemar MTR) Kota Makassar.
- Mann, C., & Stewart, F. (2000). Internet Communication and Qualitative Research: A Handbook for Researching Online: Sage.
- Mas'udi, W. & Cornelis Lay (Eds.). (2018). Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia. (Terjemahan Ika Riswandari). Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Munir, AR. et. al (2017). Kajian Ekonomi Program Longgar Di Makassar. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, 1 (1), 28-37
- Ndraha, Taliziduhu (1990). Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur, NAW. (2015). Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta' Tidak Rantasa Di Kota Makassar. Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Hasanuddin
- Nurfahmiati, H. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Lorong (Suatu Studi di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). Skripsi, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Makassar
- Paskarina, C. (2017). Politik Kesejahteraan di Tingkat Lokal. Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi (Prisma), 36 (1), 53-66
- Paskarina, C., Asiah & Madung (Eds.). (2015). Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal. Yogyakarta : Penerbit PolGov.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019.

- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Savirani, Amalinda Dkk. (2013). Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian Demokrasi di Indonesia: antara patronase dan populisme. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sumarto, M. (2014). Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam Pemilu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Zulfikar, A. et. al (2021). Implementasi Kebijakan *Smart City* dalam Mewujudkan Makassar Kota Dunia. *Journal of Public Administration and Government*, 3 (1), 37-46.